



Optimalisasi Program Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Kalimanah Kulon

Titis Widowati¹, Benny Sigiro², Bambang Agus Diana^{3*}

^{1, 2, 3}Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bambangad@ecampus.ut.ac.id

Abstract. *The presence of BUMDes is an important factor in improving the economy and community independence, such as through the village savings and loan program. However, the lack of socialization and inaccurate targeting of program recipients are problems that have implications for BUMDes capital turnover. This study aims to explain the optimization of the savings and loan program in BUMDes in realizing the economic independence of the community of Kalimanah Kulon Village, Kalimanah District, Purbalingga Regency. This study uses a qualitative case-study approach. Data were obtained through interviews, observations, and document analysis. The results show that the BUMDes savings and loan program is able to increase village income and community welfare, although it is still not optimal. In its implementation, there are several obstacles that have the potential to hinder the implementation of this program, including the issue of inadequate human resources, minimal business planning and innovation, and low community participation in loan repayment and BUMDes business management. Therefore, adequate planning by the village government to increase the capacity of managers and community participation, as well as strengthening institutions and collaboration with relevant stakeholders in BUMDes business management are important prerequisites for optimal program achievement. In addition, intensive and ongoing outreach to all levels of society regarding BUMDes programs is needed to ensure BUMDes can more optimally fulfill their role in improving village welfare and independence.*

Keywords: BUMDes; Economic Independence; Savings and Loans; Village Community; Welfare.

Abstrak. Hadirnya BUMDes merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian serta kemandirian masyarakat, seperti halnya melalui program simpan pinjam desa. Namun demikian, minimnya sosialisasi dan ketidaktepatan sasaran penerima program menjadi permasalahan yang berimplikasi pada perputaran modal BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan optimalisasi program simpan pinjam pada BUMDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Kalimanah Kulon, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program simpan pinjam BUMDes mampu meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun masih belum optimal. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang potensial menghambat pelaksanaan program ini, di antaranya persoalan sumber daya manusia yang tidak memadai, minimnya perencanaan dan inovasi usaha (bisnis), serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelunasan pinjaman dan pengelolaan usaha BUMDes. Oleh karena itu, perencanaan yang memadai oleh pemerintah desa guna meningkatkan kapasitas pengelola dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kelembagaan dan kolaborasi dengan stakeholders terkait dalam pengelolaan usaha BUMDes merupakan prasyarat penting untuk mencapai program secara optimal. Di samping itu, diperlukan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait program-program BUMDes agar BUMDes lebih optimal melaksanakan perannya dalam peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa.

Kata Kunci: BUMDes; Kemandirian Ekonomi; Kesejahteraan; Masyarakat Desa; Simpan Pinjam.

1. LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga usaha yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi desa seperti meningkatkan pelayanan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Namun, pada penerapannya BUMDes sering menghadapi tantangan dalam

kepemimpinan, dari rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan BUMDes. Pada dasarnya, BUMDes memberi pemerintah desa banyak ruang untuk beroperasi secara mandiri dan berfokus pada berbagai hal yang dapat mereka kembangkan, seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan sebagai program kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui peranan BUMDes (Sidik, 2020).

Kemandirian menjadi tujuan utama dalam berbagai aspek untuk mewujudkan kesejahteraan Desa Kalimantan Kulon. Pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk mengembangkan dan membangun perekonomian desa melalui beragam perspektif dan metode. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes sebagai sarana untuk memperbaiki taraf hidup penduduk desa. Keberadaan BUMDes dapat mendatangkan sumber pendapatan asli desa sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang mengamankan desa untuk mengembangkan BUMDes demi peningkatan pendapatan asli desa. BUMDes mampu menggerakkan ekonomi sebagai pencipta kesempatan kerja dan kesejahteraan dalam beragam potensi ekonomi lokal di berbagai sektor sesuai dengan kapabilitas dan otoritas desa (Budiaman & Mulyanti, 2021).

BUMDes menghadapi kendala dalam meningkatkan ekonomi desa karena anggota harus mengembangkan usaha milik desa dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan layanan masyarakat dengan dukungan pembiayaan dari sumber daya pendapatan asli desa yang termasuk dalam hasil pajak dan pendapatan daerah lainnya. Manfaat BUMDes sebagai wadah untuk memaksimalkan peluang, untuk pengembangan bisnis lokal sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi desa yang mendukung dan menampung aktivitas di masyarakat Desa Kalimantan Kulon. Karena penerapan yang tidak sesuai, pengawasan usaha Desa Kalimantan Kulon menjadi kurang efektif. Selain itu, kurangnya fasilitas dalam pengawasan juga menjadi kendala tersendiri yang dialami oleh pengurus BUMDes Kalimantan Kulon. Agar pengelolaan usaha desa berjalan secara lancar diperlukannya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Di mana badan usaha ini bisa melakukan usaha di bidang ekonomi ataupun pelayanan umum dengan harapan dapat menciptakan sumber daya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alam desa (Yaya Mulyana, 2025).

Program simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes memberikan manfaat besar bagi pemerintah, terutama dalam upaya mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat desa. Program ini memberikan masyarakat desa kemampuan untuk mendapatkan permodalan dengan cara yang mudah dan murah, yang membantu menumbuhkan usaha mikro dan kecil, mengurangi ketergantungan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah dapat mendukung dan memperkuat sistem ekonomi lokal yang mandiri dengan cara ini. BUMDes bagi pemerintah dijadikan sebagai program bantuan dan pembiayaan yang lebih sasaran di tingkat desa.

Pengeluaran BUMDes Kalimanah Kulon umumnya difokuskan pada operasional unit usaha, khususnya program simpan pinjam, yang menyangkut biaya administrasi, pembiayaan honor pengelola, penyediaan dana cadangan untuk resiko kredit macet serta kegiatan pendukung seperti pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, sebagian pengeluaran juga dialokasikan untuk pengembangan usaha dan perawatan aset yang dimiliki BUMDes. Pengeluaran harus proporsional dengan pendapatan untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan keuangan BUMDes dan mendukung perekonomian desa (Yassa & Bumbungan, 2021). Oleh karena itu, dalam pengelolaan BUMDes, partisipasi masyarakat juga menjadi relevan dan relevan terkait dengan optimalisasi program simpan pinjam guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Desa Kalimanah Kulon. Hal ini menjadi penting karena BUMDes diharapkan dapat menjadi roda yang dapat menggerakkan ekonomi lokal dengan mengelola dana simpan pinjam secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Program ini membantu masyarakat mendapatkan modal usaha, meningkatkan kemampuan menabung, dan mendorong pembentukan budaya ekonomi yang produktif di tingkat desa. Penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah banyak dilakukan, terutama mengenai peran BUMDes ikut serta meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat desa.

Namun, sebagian besar penelitian masih terfokus pada gambaran umum dan belum menganalisis secara dalam mengenai cara mengoptimalkan program simpan pinjam dengan pendekatan evaluasi yang menyeluruh. Penelitian ini memiliki hal baru dengan menganalisis cara penyempurnaan program simpan pinjam BUMDes menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) di lingkungan desa perkotaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih terstruktur tentang bagaimana efektifnya program tersebut dan manfaatnya bagi kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMDes dalam optimalisasi program simpan pinjam dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Kalimanah Kulon. Fokus penelitian ini bagaimana program simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes Kalimanah Kulon dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal ini menjadi relevan karena dalam pembangunan desa

yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi adalah komponen penting. Desa yang berkelanjutan diharapkan memiliki masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari luar. Dalam situasi ini, program simpan pinjam berfungsi sebagai cara yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan modal, terutama bagi bisnis kecil dan menengah di tingkat desa. Masyarakat dapat mengembangkan usaha produktif melalui menabung dan meminjam. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Kalimantan Kulon sebagai lembaga ekonomi milik desa, memiliki tanggung jawab strategis untuk mengelola program simpan pinjam dari perencanaan hingga pelaksanaan. BUMDes tidak hanya menyediakan layanan keuangan mikro tetapi juga membantu ekonomi desa dengan memberdayakan masyarakat. Untuk itu, penelitian ini juga mengkaji seberapa efektif BUMDes dalam mengelola program simpan pinjam dan dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi Desa Kalimantan Kulon. Penelitian ini semoga memberikan dapat memberi dampak positif pada pengelola BUMDes dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan maupun rencana pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dengan memahami peran BUMDes secara menyeluruh. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah “bagaimana optimalisasi program simpan pinjam terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kalimantan Kulon?”.

2. KAJIAN TEORITIS

Model CIPP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Using the CIPP (*Context, Input, Process, Product*) evaluation approach, *Stufflebeam* (1971) dalam (Mukhlisin et al., 2023) mengatakan bahwa program dapat dievaluasi secara efektif dengan menganalisis kebutuhan masyarakat (*context*), ketersediaan sumber daya (*input*), menjalankan kegiatan (proses), dan hasil yang dicapai. BUMDes Kalimantan Kulon dapat melihat program simpan pinjam sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat desa. Namun, input menghadapi kendala karena keterbatasan sumber daya manusia dan modal. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi program membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan penguatan kapasitas pengelola agar hasil, yaitu peningkatan kemandirian ekonomi, dapat dicapai secara berkelanjutan.

Selain itu, konsep *microfinance* Yunus 2010 dalam jurnal (Ahmad et al., 2023) menekankan bahwa kemampuan untuk mendapatkan permodalan kecil dengan bunga rendah memiliki potensi untuk mendorong usaha mikro dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Program simpan pinjam BUMDes, lembaga keuangan lokal berbasis komunitas, menggunakan prinsip ini. BUMDes meningkatkan ekonomi

masyarakat dengan memberikan pinjaman murah. Mereka juga membangun budaya menabung dan memperkuat solidaritas sosial di tingkat desa.

Optimalisasi program simpan pinjam BUMDes adalah langkah penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Ini didasarkan pada teori evaluasi program (CIPP) dan konsep keuangan mikro, dan menekankan pemberdayaan berbasis komunitas dan inklusi.

Teori Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Desa

Pada era demokrasi, partisipasi sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Hidayana et al., 2019), dan suatu metode yang tepat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Chambers dalam jurnal (Akbar & Zulkarnain, 2023) yang berjudul *Participatory Rural Appraisal* dalam Strategi Pengembangan Agrowisata Telaga Madiredo, *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah Evaluasi Peserta Desa (PRA) adalah sebuah pendekatan untuk memahami masalah sosial di pedesaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Metode ini memungkinkan masyarakat desa untuk berdiskusi dan menganalisis situasi dan kehidupan di desa.

PRA dapat dianggap sebagai gabungan melalui cara pendekatan yang dapat diharapkan masyarakat desa bisa meningkatkan pemahaman dan partisipasinya dalam pembangunan desa. Selain itu juga, dalam konsep pembangunan desa yang berpartisipasi, menurut Chambers (1999), pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Ini sesuai dengan fungsi BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang berbasis komunitas. Program simpan pinjam yang dikelola BUMDes Kalimanah Kulon bukan hanya memberikan kemampuan untuk mendapatkan permodalan, tetapi juga menjadi cara bagi masyarakat untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Program ini dapat memperkuat ekonomi desa dengan mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Optimasi program simpan pinjam BUMDes bukan hanya masalah manajemen keuangan desa; itu adalah strategi pembangunan berkelanjutan yang menekankan partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penciptaan kesejahteraan yang mandiri. Selanjutnya, dalam penelitian (Hidayana et al., 2019) menjadi unsur krusial dalam tahap perencanaan pembangunan yang melahirkan CAP desa wisata. Peran seorang antropolog menjadi sangat relevan dalam membantu masyarakat untuk memahami dan menerapkan CAP desa wisata, karena secara metodologis, antropolog biasa menggunakan pendekatan induktif dan melakukan penelitian berukuran kecil serta bersifat mikro untuk memetakan isu-isu serta menemukan tesis penelitian. Dengan metode induktif, antropolog mengumpulkan data lapangan melalui wawancara mendalam dan dalam kegiatan

PRA, tugas mereka adalah memberikan akses kepada warga untuk berbagi cerita, memetakan persoalan, serta merumuskan rencana. Kegiatan PRA dapat dilakukan oleh lulusan antropologi dan sekaligus sebagai forum untuk melaksanakan kerja-kerja aksi antropologi secara partisipatif.

3. METODE PENELITIAN

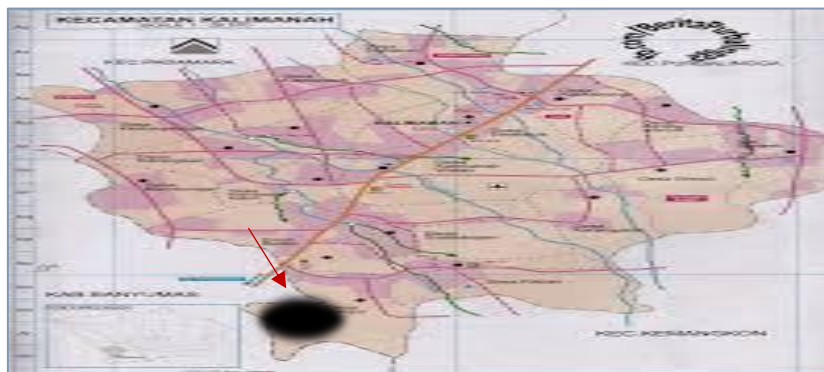
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode berupa studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengenali secara mendalam kinerja anggota pemerintah Desa Kalimantan Kulon dalam menjalankan peranan BUMDes. Peneliti juga mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ini tepat digunakan untuk mengkaji sebuah masalah sosial dan dijadikan sarana penyelesaian suatu masalah yang bersifat fakta/realita (R. C. Adi Firmansyah & Gading Gamaputa, 2025). Jenis data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui referensi jurnal, buku, dan landasan hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan Direktur BUMDes Kalimantan Kulon, Kepala Desa, Pengurus BUMDes, Kepala Dukuh, Tokoh Masyarakat dan warga untuk menggali informasi terkait pengalaman dan persepsi. Pertanyaan wawancara disusun secara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sebagai berikut; (1) peran kinerja BUMDes dalam optimalisasi program simpan pinjam untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Kalimantan Kulon; dan (2) strategi yang digunakan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Kalimantan Kulon. Penelitian ini berfokus pada program optimalisasi program BUMDes dan dampaknya terhadap masyarakat desa dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Kalimantan Kulon. Penelitian deskriptif analitis ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja pemerintah desa dan menganalisis seberapa efektif, efisien, dan relevan ketika melaksanakan program simpan pinjam dalam ekonomi masyarakat desa dengan BUMDes. Penelitian dilakukan di Desa Kalimantan Kulon, Kecamatan Kalimantan, dengan fokus utama pada optimalisasi program simpan pinjam desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di desa. Desa Kalimantan Kulon dipilih karena potensinya yang signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal. Teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya kondensasi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, 2020). Beberapa sumber dalam pengambilan data, seperti Kepala Desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, serta warga yang menggunakan program simpan pinjam. Teknik triangulasi digunakan dengan cara melakukan wawancara, pengamatan,

dan mencatat dokumen. Selain itu, hasil wawancara diulang lagi kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Simpan Pinjam di Desa Kalimanah Kulon

Desa Kalimanah Kulon adalah satu daerah yang berada di Kecamatan Kalimanah. Sebagai salah satu desa urban, Kalimanah Kulon memainkan peran penting dalam pengembangan perkotaan. Desa Kalimanah Kulon dianggap sebagai kawasan padat penduduk karena lokasinya di daerah desa dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, interaksi sosial warganya tetap erat dan harmonis, yang menjadikan model pengembangan desa. Masyarakat desa aktif dalam berbagai kegiatan sosial ekonomi, termasuk dalam bidang usaha UMKM. Seperti pembuatan sapu glagah oleh penduduk setempat yang bahkan diekspor ke luar negeri. Program simpan pinjam di BUMDes Kalimanah Kulon dirancang untuk mendukung usaha mikro dan kecil di desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman rentenir ataupun pinjaman online (pinjol).



Gambar 1. Letak wilayah Desa kalimanah Kulon pada peta Kecamatan Kalimanah

(Sumber: Peta Web)

Berdasarkan peta distribusi partisipasi masyarakat dalam program simpan pinjam BUMDes di Desa Kalimanah Kulon, terlihat adanya konsentrasi partisipasi yang tinggi di Wilayah Dusun 1 desa. Fenomena ini menjadi dasar analisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat di berbagai wilayah desa, khususnya hambatan dan peluang yang ada.

Program simpan pinjam BUMDes di Desa Kalimanah Kulon menawarkan akses permodalan dengan bunga rendah dan persyaratan yang ringan, yang secara langsung mendukung peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan pendekatan inovasi

simpan pinjam di desa Selabaya yang mengurangi ketergantungan pada rentenir dan menciptakan ketahanan pangan lokal desa. Program ini memberikan modal usaha bagi warga untuk mengembangkan sektor mikro seperti pertanian dan perdagangan. Selain itu, pengalaman koperasi dan unit simpan pinjam di berbagai desa menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro desa mampu menyediakan layanan inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan menstimulasi pendapatan lokal (Suti wahyuni et al., 2025).

Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

BUMDes merupakan sarana yang didirikan oleh pemerintah desa bagi masyarakat yang menjalankan usahanya berdasarkan kebutuhan dan perekonomian desa (Dewi Patmawati, 2023). Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran BUMDes memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan ekonomi desa. Di samping itu, BUMDes membantu usaha lokal berkembang dan mandiri sehingga memperoleh pendapatan asli desa (Sidik, 2020).

Sejalan dengan itu, BUMDes di Desa Kalimantan Kulon berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh: (1) Penyedia lapangan kerja lokal, BUMDes menawarkan peluang kerja bagi warga, seperti unit simpan pinjam dapat merekrut tenaga asli desa yang mempunyai kompetensi di bidang wirausaha dengan bunga rendah yang dapat mengurangi kemiskinan atau utang Pinjol. (2) Pendapatan Asli Desa (PAD), BUMDes menghasilkan pendapatan asli desa, yang dulunya masyarakat terjerat pinjol dan rentenir sehingga keuntungan masuk kepada pinjol dan rentenir. Dengan adanya BUMDes simpan pinjam masyarakat beralih ke BUMDes sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan dan program sosial desa. (3) Menambah kapasitas sumber daya manusia desa, BUMDes membantu meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan warga melalui pelatihan dan pengelolaan usaha yang dikelola dalam pendapatan asli desa dengan sasaran masyarakat Desa Kalimantan Kulon yang mampu melaksanakan kegiatan usaha.

BUMDes Kalimantan Kulon memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian di desa, dengan rendahnya bunga simpan pinjam akan mengurangi masyarakat pada kemiskinan dan mempermudah masyarakat dalam membuka peluang usaha sebagai kontribusi dalam pendapatan asli desa sehingga meningkatnya kemandirian ekonomi di lingkungan masyarakat Desa Kalimantan Kulon.

Sebagai gambaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai imbas dari optimalisasi BUMDes, berikut ini ditampilkan data PAD Desa Kalimantan Kulon Tahun 2024-2025.

Tabel 1. Subsidi Dana Desa ke BUMDes

No.	Tahun	Dana Desa	Dana untuk BUMDes
1.	2024	Rp 828.756.000	Rp 165.751.200
2.	2025	Rp 823.233.000	Rp 164.646.600

Sumber: Desa Kalimanah Kulon (2025)

Tabel 1. menunjukkan distribusi DD kepada BUMDes Kalimanah Kulon selama dua tahun terakhir, 2024 dan 2025. DD merupakan sumber pendanaan utama untuk upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, yang sebagian dialokasikan khusus untuk BUMDes guna mendukung operasional dan program usahanya. Pada tahun 2024, DD sebesar 828.756.000 diterima, dengan BUMDes menerima sekitar 20% dari DD yaitu Rp 165.751.200. Sedangkan tahun 2025 DD yang diterima sedikit menurun menjadi Rp 823.233.000 dan DD untuk BUMDes juga mengalami penurunan proposional menjadi Rp 164.646.000. Alokasi dana menunjukkan bahwa sekitar 20% dari DD setiap tahun dialokasikan untuk pertumbuhan dan operasi BUMDes Kalimanah Kulon. Hal ini menandakan perhatian yang cukup serius dari pemerintah desa dengan mendukung keberlangsungan dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola BUMDes yang disampaikan dalam musyawarah di Desa Kalimanah Kulon mengungkapkan ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usaha milik desa selama ini, sebagai berikut: (1) Keterbatasan Modal, BUMDes tidak dapat mengembangkan bisnis baru dengan baik karena mereka tidak memiliki modal usaha yang cukup. Baik dari segi cara untuk meningkatkan kapasitas produksi dan sulit bersaing dengan usaha lain yang memiliki modal lebih besar. (2) Sumber Daya Manusia yang Kurang Kompeten, banyak pengelola BUMDes tidak memiliki pengalaman kewirausahaan atau manajerial yang cukup. Hal tersebut menjadi kendala, sebab SDM sangat diperlukan baik untuk pemasaran, akuntansi, dan pengembangan usaha di desa. Sehingga diperlukannya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan. Rata-rata masyarakat Kalimanah Kulon mengenyam pendidikan selama 9-10 tahun sehingga kompetensinya tidak mampu bersaing. (3) Kurangnya Inovasi dalam Usaha, usaha yang dijalankan cenderung konvensional dan belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. BUMDes dapat *stagnan* dan tertinggal oleh kemajuan teknologi karena kurangnya inovasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya akses beerupa web, media sosial, yang terhubung dengan BUMDes sehingga pihak luar kesulitan masuk untuk memahami kinerja dan usaha BUMDes. (4) Kurangnya Dukungan antar Lembaga, masih kurangnya koordinasi antara BUMDes, pemerintah desa dan mitra bisnis luar desa. Ini menghambat kinerja dan pertumbuhan BUMDes. Koordinasi yang lemah bisa menjadikan suatu permasalahan dalam berbagai kegiatan, hingga evaluasi kegiatan usaha yang

dijalankan oleh BUMDes. Pada dasarnya koordinasi dan komunikasi itu sebagai kunci terjalannya suatu kerjasama. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga Desa bahwa BPD, LMD, Paguyuban RT dan Tokoh-tokoh masyarakat tidak dilibatkan dalam masyarakat BUMDes.

Menurut (Arizal et al., 2023), ini adalah alasan mengapa pengelolaan BUMDes belum mencapai hasil yang optimal dalam simpan pinjam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manajemen hanya berkonsentrasi pada penerapan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) dalam analisis kelayakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes, dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya Perencanaan Bisnis yang Matang

Tidak semua unit usaha diawali dengan studi kelayakan atau rencana bisnis yang jelas disebabkan kurangnya perencanaan bisnis yang tidak efektif.

2. Kurangnya transparansi keuangan

Masih ada administrasi keuangan yang melanggar peraturan akuntansi dasar. Karena tidak dapat diakses oleh pihak luar maka masyarakat tidak dapat melakukan kontrol terhadap laporan keuangan.

3. Minimnya Pendampingan dan Pelatihan

Pengelolaan kredit tidak efektif karena tidak ada pengawasan dan pendampingan dari instansi terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Sejumlah warga masyarakat tampak masih apatis dan belum melihat BUMDes sebagai bagian dari upaya membangun desa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hal tersebut juga menjadi penyebab utama Desa Kalimantan Kulon belum maksimal dalam mengelola BUMDes. Karena faktor modal dan kondisi yang kurang diperhatikan, keputusan kredit tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan mendalam, yang mengakibatkan pengelolaan kredit yang tidak efisien dan berkontribusi pada kualitas yang rendah pengelolaan pinjaman menyebabkan peningkatan risiko kredit macet. Penyebab lainnya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami apa arti dari BUMDes dalam program simpan pinjam yang memberikan kemudahan bagi masyarakat desa agar mengurangi peminjaman pada Bank luar, kreditur ataupun oknum yang memberikan bunga tinggi seperti rentenir dan pinjol. Meskipun BUMDes memiliki potensi strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa, peningkatan kapasitas manajemen dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci penting untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Pada dasarnya usaha BUMDes untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan potensi ekonomi lokal desa. BUMDes diatur secara jelas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87–90, (Leniwati & Aisyah, 2021).

Berikut data yang menunjukkan program simpan pinjam yang dijadikan sebagai acuan tentang Pemanfaatan masyarakat yang menggunakan program tersebut. Adapun sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pemanfaatan Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Kalimanah Kulon Tahun 2025

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk Desa	4.500 jiwa
2.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	950 KK
3.	Jumlah Nasabah Simpan Pinjam	300 KK
4.	Persentase KK yang Menjadi Nasabah	31,58%

Sumber: Desa Kalimanah Kulon (2025)

Pada **Tabel 2.** di tahun 2025, Desa Kalimanah Kulon memiliki 4.500 penduduk, dengan 950 kepala keluarga (KK), dengan 300 KK yang terdaftar sebagai nasabah aktif program simpan pinjam BUMDes. Ini menunjukkan bahwa sekitar 31,58% dari total kepala keluarga telah menggunakan layanan simpan pinjam untuk mendapatkan modal usaha dan memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Meskipun masih ada peluang yang cukup besar untuk melibatkan lebih banyak warga desa yang belum terlibat, pencapaian ini menunjukkan bahwa program dipercaya dan menarik bagi masyarakat (Savira, 2025).

Strategi Peningkatan Kemandirian Ekonomi melalui BUMDes

Dalam pengelolaan BUMDes Kalimanah Kulon, pengurus BUMDes telah menerapkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Salah satu strateginya adalah mendorong partisipasi aktif warga melalui pertemuan rutin warga dan pembentukan tim kerja, dimana setiap orang mempunyai peran dalam kesuksesan usaha dengan tujuan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mengelola usaha desa. Pengelola BUMDes Kalimanah Kulon menyadari pentingnya pengelolaan yang kompeten dalam menjalankan usaha sehingga secara rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengelola BUMDes agar dapat mengelola usaha secara profesional dan efisiensi. Pengelola BUMDes juga akan memberikan inovasi baru, seperti memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. Mereka juga akan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan pengembangan bisnis mereka dan berkelanjutan agar BUMDes Kalimanah Kulon berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa strategi dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi di Desa Kalimanah Kulon, antara lain:

1. Penguatan Kapasitas SDM

Hal ini bisa dicapai dengan diklat kewirausahaan, pengelolaan usaha, dan keuangan.

2. Diversifikasi Usaha

Dapat mendirikan usaha baru yang berbasis potensi lokal seperti produk olahan pangan, atau e-commerce desa. Meningkatkan pendapatan akan meningkatkan ekonomi desa dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

3. Kemitraan dan Kolaborasi

Dibutuhkan kolaborasi dengan bisnis, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Adanya penerapan sistem keuangan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebab masyarakat mengetahui keuangan yang ada. Dengan sistem keuangan yang transparan, seperti e-budgeting dan publikasi laporan keuangan, masyarakat menjadi lebih percaya pada sistem, karena mereka sekarang dapat melihat dan mengawasi langsung bagaimana anggaran digunakan.

5. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat harus diberikan ruang dan informasi untuk ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi BUMDes.

BUMDes dapat lebih efektif meningkatkan pendapatan asli desa dan mendorong kemandirian ekonomi desa dengan menerapkan strategi, (Wijaya, 2023).

Berdasarkan penjabaran tentang optimalisasi program simpan pinjam pada BUMDes untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Kalimanah Kulon, meningkatkan analisis pada data tersebut. Tahap selanjutnya merupakan tahap pembahasan yang memuat hasil analisis peneliti terhadap data yang telah diperoleh serta melalui data sekunder menggunakan landasan teori berupa Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah desa yang menginstruksikan dimana BUMDes dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa. Peneliti menggunakan teori model CIPP menurut Daniel L. Stufflebeam dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja BUMDes tentang optimalisasi program simpan pinjam untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Desa Kalimanah Kulon. BUMDes Kalimanah Kulon menjalankan program simpan pinjam dengan menggunakan model *context, input, process, product* (Nukhbatillah et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Kalimanah Kulon yang sebagian besar bekerja di sektor informal dan membutuhkan akses modal usaha. Untuk input, pemerintah desa telah menggunakan dana desa untuk menyediakan modal awal, tetapi masih ada kelemahan dalam kesiapan sumber daya manusia, seperti kurangnya pelatihan dan sistem administrasi yang tidak terorganisir. Dalam hal proses, pelaksanaan program dianggap cukup baik karena prosedurnya mudah dan umum. Namun, sosialisasi yang masih terbatas dan kurangnya pengawasan pinjaman menyebabkan beberapa masalah di lapangan. Di sisi produk atau hasil, sebagian besar penerima manfaat telah merasakan manfaat dari program ini, seperti peningkatan pendapatan dan pertumbuhan usaha kecil. Selain itu hasil penelitian merujuk pada penelitian (Laili Nihayah et al., 2021). Menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang dioptimalkan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan desa secara langsung. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa di lingkungan desa perkotaan, masalah utamanya adalah partisipasi masyarakat yang rendah dan kurangnya inovasi dalam mengelola program simpan pinjam.

Di tahun 2025 ini program simpan pinjam menunjukkan 55% total penerima manfaat berdasarkan *survey* dari masyarakat. Jika dilihat dari pelaksanaan, program ini dianggap efektif dalam pemanfaatan keuangan usaha desa, meskipun partisipasi masyarakat, yang berjumlah sekitar 35%, masih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, model CIPP menunjukkan kekuatan dan kelemahan program secara keseluruhan dan berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan selanjutnya agar BUMDes dapat berkontribusi lebih optimal dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan warga Desa Kalimanah Kulon menunjukkan bahwa program simpan pinjam BUMDes memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan pribadi mereka. Secara umum BUMDes banyak memberikan manfaat pada masyarakat. Namun, aspek pelatihan menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat untuk bertindak sendiri, karena minimnya sosialisasi.

Tabel 3. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Optimalisasi Program Simpan Pinjam BUMDes

Aspek	Sebelum Optimalisasi Program	Sesudah Optimalisasi Program
Akses terhadap Modal Usaha.	Sulit, bergantung pada pinjol atau rentenir dengan bunga tinggi.	Mudah di akses melalui BUMDes dengan bunga rendah.
Kemandirian Masyarakat.	Rendah, banyak usaha skala kecil yang tidak berkembang.	Meningkat, masyarakat mulai menjalankan usaha mandiri dan produktif.
Kapasitas SDM.	Kurang dan minim pelatihan.	Meningkat, warga mendapat pelatihan manajerial dan kewirausahaan dari BUMDes.
Partisipasi Masyarakat.	Tidak terstruktur, dan minim perencanaan dan transparan.	Lebih profesional dengan menerapkan manajemen usaha.

Sumber: Hasil penelitian 2025 (diolah)

Tabel 3. menunjukkan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah optimalisasi program simpan pinjam BUMDes di Desa Kalimantan Kulon. Hal bahwa peran BUMDes membawa perekonomian desa semakin nyata, terutama melalui penyediaan akses modal yang lebih mudah, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal. Sebelum optimalisasi, BUMDes di Desa Kalimantan Kulon menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan modal, restrukturisasi, dan kurangnya sumber daya manusia. Setelah optimalisasi, efisiensi, transparansi, dan kontribusi PAD telah meningkat.

Sebagaimana telah disampaikan dari hasil penelitian (R. C. Adi Firmansyah & Gading Gamaputa, 2025), yang menilai kinerja BUMDes di Desa Bulugunung, menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan BUMDes berdampak langsung pada peningkatan perekonomian desa. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa kinerja BUMDes yang baik menjadi kunci utama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Desa Kalimantan Kulon, dengan optimalnya BUMDes, PAD telah mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Dari hasil telaah data yang dipaparkan dalam BUMDes Kalimantan Kulon bahwa di tahun 2024 PAD sebesar Rp 80.000.000 dan meningkat pada Tahun 2025 menjadi sebesar Rp 110.000.000. ini membuktikan bahwa optimalisasi BUMDes berdampak positif terhadap PAD Kalimantan Kulon.

Tabel 4. Data PAD Kalimantan Kulon Tahun 2024 – 2025 Berdasarkan Jenis Usaha BUMDes

Jenis Usaha BUMDes	PAD Tahun 2024 (Rp)	PAD Tahun 2025 (Rp)
Unit Sewa Alat Pertanian	15.000.000	20.000.000
Unit Simpan Pinjam	30.000.000	40.000.000
Toko Desa (Unit Dagang)	25.000.000	35.000.000
Unit Layanan Jasa	10.000.000	15.000.000
Total PAD dari BUMDes	80.000.000	110.000.000

Sumber: Desa Kalimantan Kulon (2025)

Dari **Tabel 4.** terlihat bahwa BUMDes memberikan kontribusi peningkatan yang hampir sama sebesar 37% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Data tersebut menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan BUMDes, yang menghasilkan PAD yang lebih baik di Desa Kalimantan Kulon. Hal serupa juga terjadi pada daerah lain di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana penelitian Nihayah dan Mustofa yang menunjukkan peningkatan terhadap PAD. Dengan pengelolaan BUMDes yang semakin baik dan optimal berdampak positif terhadap peningkatan PAD (Laili Nihayah et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian data diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi program simpan pinjam mampu meningkatkan PAD dan masyarakat Desa Kalimanah Kulon, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hasil implementasi program menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal akses permodalan dan kapasitas SDM, serta peningkatan PAD tahun 2025 dari tahun 2024 sebelumnya. Selain itu, optimalisasi program menurunkan ketergantungan masyarakat pada pinjaman dari pinjol dan rentenir. Namun demikian, pengelolaan BUMDes yang berkelanjutan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan modal, kurangnya pengalaman pengelola, kurangnya inovasi usaha, dan rendahnya partisipasi masyarakat seperti yang ditandai dengan belum maksimalnya peserta atau jumlah kepala keluarga yang aktif dalam program simpan pinjam.

Untuk meningkatkan kontribusi BUMDes Kalimanah Kulon terhadap pembangunan ekonomi desa, diperlukan rencana kedepan guna memperkuat kelembagaan dan meningkatkan SDM melalui pelatihan manajerial dan kewirausahaan yang rutin. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif, pemerintah desa harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, untuk mempercepat sistem usaha seperti digitalisasi layanan dan pemasaran produk lokal, diperlukan kolaborasi lintas sektor seperti dengan lembaga pendamping, lembaga swasta, maupun dengan pihak akademisi. Selain itu, agar program BUMDes diharapkan menjadi lebih dikenal, diterima dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat desa, diperlukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan.

Secara teori, penelitian ini memperkuat penggunaan model evaluasi CIPP untuk menganalisis efektivitas program ekonomi desa, terutama program simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes. Model ini bisa mengenali dengan cara yang rapi apakah program sesuai, apakah sumber daya sudah siap, bagaimana proses pelaksanaannya, serta dampak program terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Dan secara praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam meningkatkan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, serta perluasan partisipasi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, A. A., Zain, M. N. M., & Haryanto, R. (2023). Micro Financing Revolution By Dr. Muhammad Yunus Through Grameen Bank: A Movement Towards Eradication Of Poverty According To Islam. *Al-Qanatir: International Journal ...*, 31(2), 132–140. <http://al-qanatir.com/aq/article/view/712>
- Akbar, M. I., & Zulkarnain. (2023). Participatory Rural Appraisal dalam Strategi Pengembangan Agrowisata Telaga Madiredo. *GAES-PACE Book Publisher*, 127–138. <https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/gaespace/article/view/172%0Ahttps://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/gaespace/article/download/172/135>
- Arizal, M., Hasnawati, S., Hendrawaty, E., Marvinita, R., & Fathia, S. N. (2023). Penerapan Prinsip 5C pada Layanan Simpan Pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 671–678. <https://doi.org/10.54082/jamsi.704>
- Budiaman, H., & Mulyanti, D. (2021). Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 116. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.5020>
- Dewi Patmawati. (2023). AKSESIBILITAS PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM BUMDESA WAGE BERSINAR, DESA WAGE, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR. In *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* (Vol. 53, Number 1). <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Hidayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.22146/bb.50890>
- Laili Nihayah, F., Moehadi, & Mustofa, M. (2021). Peranan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 4(1), 36–43. <https://doi.org/10.56071/jemes.v4i1.257>
- Leniwati, D., & Aisyah, A. N. (2021). Pengelolaan Ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 127–139. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12414>
- Miles. (2020). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks. SAGE Publications.
- Mukhlisin, L., Martiana, D. S., Armandio, M. D., & Herwina, W. (2023). Penerapan Model Evaluasi Cipp (Context, Input, Process, Product) Pada Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas (Blkk) Amanah Kota Tasikmalaya. *Cermin : Jurnal Penelitian*, 7(1), 11–21.

- Nukhbatillah, I. A., Setiawati, S., Hasanah, U., & Nurmalasari, N. (2024). Evaluasi Mutu Pendidikan Menggunakan Pendekatan Teori Stufflebeam. *Jurnal Global Futuristik*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i1.352>
- R. C. Adi Firmansyah, & Gading Gamaputa. (2025). *Performance evaluation of village-owned enterprises (bumdes) to improve the village economy (case study in bulugunung village, plaosan district, magetan district)*. 4(1), 2025–2100.
- Savira, A. (2025). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Ombe Baru. *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman*, 5(1), 73–83. <https://doi.org/10.57215/muslimpreneur.v5i1.510>
- Sidik, H. (2020). Meningkatkan peran adan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi pedesaan di desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21–30.
- Suti wahyuni, Nila Kesumawati, & Faisal Riza. (2025). *IPERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI SMA NEGERI 1 PALEMBANG Suti*. 6, 906–916.
- Wijaya, N. (2023). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, vol 10(1), 2477–4707.
- Yassa, S., & Bumbungan, B. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Masyarakat. *Journal Social Society*, 1(1), 28–32. <https://doi.org/10.54065/jss.1.1.2021.52>
- Yaya Mulyana. (2025). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka.